

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KONSTITUSIONALITAS  
 PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI PADA ANAK USIA  
 SEKOLAH DAN REMAJA (KAJIAN TERHADAP PASAL 103 AYAT  
 (4) HURUF E PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN  
 2024)**

**Skripsi**

**Oleh**  
**Mista Atmaja Gholuizha**  
**NIM: 05040421118**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mista Atmaja Gholuizha  
NIM : 05040421118  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Konstitusionalitas Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Anak Usia Sekolah dan Remaja (Kajian Terhadap Pasal 103 Ayat (4) huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2025  
Saya yang menyatakan,



**Mista Atmaja Gholuizha**  
**NIM. 0504042118**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh:**

Nama : Mista Atmaja Gholuizha  
NIM. : 05040421118  
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Konstitusionalitas Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Anak Usia Sekolah dan Remaja (Kajian Terhadap Pasal 103 Ayat (4) huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah

Surabaya, 5 Mei 2025

Pembimbing



**Dr. Anis Farida S.Sos.,S.H.,M.Si**  
NIP. 197208062014112001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama Mista Atmaja Gholuizha

NIM : 05040421118

Judul Tinjauan Fiqh Syiasah Terhadap Konstitusionalitas Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Anak Usia Sekolah dan Remaja (Kajian Terhadap Pasal 103 Ayat (4) huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

Pengaji I

  
Dr. Anis Farida S.Sos, S.H., M.Si

NIP. 197208062014112001

Pengaji III

  
H.Ahmad Khubay Ali Romhat, S.Ag, M.Si

NIP. 19780920200901100

Pengaji II

  
Drs. H.Jeje Abd.Rojak, M.ag

NIP. 196310151991031003

Pengaji IV

  
Abdulkarim Fitri Anto, M.Si

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 13 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Jl. Veteran No. 12  
Surabaya, Jawa Timur 60111

  
Drs. H. Muhyah-Mu'ayyidah, M.Ag.  
NIP. 19630327499032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mista Atmaja Gholuizha  
NIM : 05040421118  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : mistaatmaja76@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Konstitusionalitas Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Anak Usia Sekolah dan Remaja (Kajian Terhadap Pasal 103 Ayat (4) huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2025

Penulis

(Mista Atmaja Gholuizha )

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas Pasal 103 Ayat (4) Huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada polemik dan potensi implikasi hukum serta sosial yang timbul akibat kebijakan tersebut. Pasal ini secara spesifik memasukkan penyediaan alat kontrasepsi sebagai salah satu upaya dalam pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Keluarga Besar Korps Remaja. yang dapat diakses oleh kelompok usia sekolah dan remaja.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini akan mengkaji kesesuaian pasal tersebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Analisis akan difokuskan pada prinsip-prinsip konstitusional seperti hak atas kesehatan, hak atas informasi, perlindungan anak, nilai-nilai agama dan moralitas, serta otonomi daerah dalam penyelenggaraan Keluarga Besar Korps Remaja. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan konstitusional kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja,

Mengidentifikasi potensi konflik norma, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan kepentingan terbaik bagi anak dan remaja di Indonesia. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan perspektif dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, ahli hukum, tenaga kesehatan, dan tokoh agama, untuk mendapatkan gambaran yang holistik mengenai isu ini

**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vix</b>
<b>DATA TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Definisi Oprasional .....	13
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II TINJAUN UMUM FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH ALAT KONTRASEPSI PADA ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Fiqh Siyasah Dusturiyah .....	17
B. Teori Perundang-Undangan .....	22
C. Teori Hak Asasi Manusia .....	30

<b>BAB III KONSTITUSIONALITAS PASAL 103 AYAT (4) HURUF E PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2024 TENTANG PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI.....</b>	<b>35</b>
A. Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 .....	35
B. Prosedur Pembentukan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 .....	43
C. Kebijakan Konstitusionalitas Pasal 103 Ayat 4 .....	46
D. Penerapan Peraturan Pemerintah .....	49
<b>BAB IV ANALISIS FIQH DUSTURIYAH TERHADAP REGULASI PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI .....</b>	<b>52</b>
A. Analisis Kewenangan Terhadap Penyediaan Alat Kontrasepsi Dalam Islam	
52	
B. Analisis <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*,. Jakatra: Prenadamedia, 2018.
- Abdul Aziz Dahlan. "Ensiklopedia Hukum Islam." Jakarta: *Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996 ,1442*, 1966.
- Abdurrohman Jufri. "Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad Saw." *Rangerang: Pustaka Iman, 2019, 201.*,
- Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azazi, Janin. "Pandangan al-Quran dan Ilmu Kedokteran," h.112.
- Ahmad Sukardja. "Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih dan Qanun." Jakarta: *Sinar Grafika, 2012, 4-5.*
- Ahmad Syauqi Al Fanjari. *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*. Jakarta: ( Bumi Aksara)
- Dr.Ida Umami. "Psikologi Remaja," 2019, 15.
- H.A.Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*,. 1 ed. Pernada Media: Jakarta, 2005.
- Hairil Akbar, S.KM., M.Epid, Ns. dan Muhammad Qasim, S.Kep., M.Kes,. *Teori Kesehatan Reproduksi*. Yayasan Penerbit Muhamad Zaini,
- M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 7. (Cet.VI; Jakarta: Lentera Hati, 2006),
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,. Vol. 6. (Cet.VI; Jakarta: Lentera Hati, 2006),
- M. Tahir Maloko, Ar-Radha'ah . : “: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam,”, h.124-125.
- . *Kontekstualitas Doktrin*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rima Wirenviona, Anak Agung Istri Dalem Cinthya Riris. *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. Airlangga University Press, 2020.
- Soekidjo, Notoatmodjo. *Kesehatan masyarakat*. 11 ed. Jakarta: RinnekaC, 2007.
- Tim Dar al-Alim. *Atlas Sejarah Islam: Sejak Masa Permulaan Hingga Kejayaan Islam*, (Depok: Kaysa Media, 2011),
- Muslimin, J. M. *Teori dan Praktik Perundang-Undangan: Menyongsong Dinamika Legislasi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group., 2022.

## JURNAL

Abdul Wahab Khallaf."Khulashah Tarikh Tasyriiya" *Kuwait: Dar al-Qalam*, 37.

Fika Nurul Ulya. "Kemenkes Jelaskan Tujuan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Remaja di PP tentang Kesehatan," 2024.

[https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/22553621/kemenkes-jelaskan-tujuan-penyediaan-alat-kontrasepsi-untuk-remaja-di-pp?utm\\_source](https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/22553621/kemenkes-jelaskan-tujuan-penyediaan-alat-kontrasepsi-untuk-remaja-di-pp?utm_source)

*Hak Anak dalam Konstitusi Indonesia*. Diakses dari Konstitusi Indonesia., 2020.

*Ibid*,

Ihza Alfarisi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tubektomi Di Desa Noreh Kecamatan Sresek Kabupaten Sampang’, Skripsi.” (*Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel*, 2014) h.33–34.

Iswahyuni, T., & Imaduddin, A. “Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau Dari Maqashid Syariah. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 5(2), 248-264,” 2024.

*Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Pedoman Pelayanan., 2021.

“Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.,”

Maklumat.Id. (N.D.). “Pp No. 28 Tahun 2024 Tidak Sinkron Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.,” 1 Januari 2025.

Mardian Wibowo. “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang” Volume 12, Nomor 2, (2015): 15.

Muhammad Iqbal. “Fiqh Siyasah,”

Noveri Aisyaroh. “Kesehatan Reproduksi Remaja.” *Jurnal Majalah Ilmiah Vol 5.No 2* (2010): 5.

Petter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada Media,

Piaget, J. *The Science of Education and the Psychology of the Child*. Orion Press., 1970.

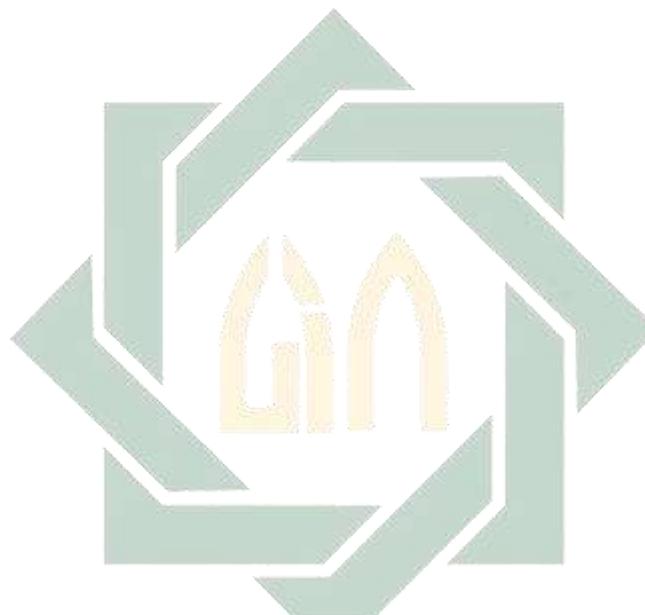
Putri Narendra Duhita Kusuma Wardhani. “Keseimbangan Antara Hak Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Norma Sosial Dalam Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja,” 2024.

Syaputra, M. Y. A. “Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie. *Jurnal Mercatoria*,9(2),” 2016, 95-103.

“UNICEF Indonesia. (2021). Adolescents’ Rights and Access to Reproductive Health Services in Indonesia.”

“World Health Organization (WHO).,”

- Yazid Imam. “‘Taqnin al-Ahkam: Sejarah Keabsahan dan Tantangan di Indonesia.’” *al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 5 (2017), 196,
- Hadisoemarto, F. X. “The role of comprehensive sexual education in adolescent health in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*,” 2020, 15(2), 101-110.
- Wantu, F. M. “Eksistensi asas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legalitas*,” 2013, 6(2), 1-11.



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**